



Pengenalan Komunitas Kebijakan Lingkungan Hidup Melalui Peran *Civil Society* Pada Komunitas Bank Sampah Kenari Indah

Wawan Edi Kuswandoro, Novy Setia Yunas ✉, Amin Heri Susanto

Universitas Brawijaya Malang

Jl. Veteran, Ketawanggede, Kecamatan. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

| novysetiayunas@ub.ac.id ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v9i1.5430> |

Abstrak

Persoalan sampah menjadi persoalan yang serius dihadapi oleh setiap daerah. Salah satunya yang dihadapi oleh kota Probolinggo, Jawa Timur. Kota Probolinggo mengalami persoalan sampah dimana terdapat 40 ton sampah domestik yang harus dikelola setiap hari, dengan komposisi sampah padat per orang mencapai 2,5 kg. Namun hanya 70 persen dari jumlah tersebut yang dapat diangkut ke TPA. Kondisi pengelolaan sampah yang terbatas serta minimnya alternative dalam mengelola sampah menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Sehingga alternative pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah harus diwujudkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang didesain dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi serta kemampuan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, mendorong adanya pemahaman yang komprehensif terhadap *policy community* dalam pengelolaan bank sampah serta yang terpenting adalah meningkatkan partisipasi serta mendorong upaya kolaboratif dengan stakeholder terkait dalam pengembangan pada komunitas bank sampah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui 3 tahapan yakni pertama adalah melalui penyampaian konsep *policy community* (komunitas kebijakan) dalam forum workshop. Tahapan kedua, peserta mempraktikkan konsep *policy community* serta upaya membangun kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah. Serta pada tahapan yang terakhir, peserta dievaluasi oleh tim pengabdian masyarakat terhadap sejauh mana pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir pelaksanaan. Hasilnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana *policy community* dapat diimplementasikan pada pengelolaan bank sampah yang ada di komunitas bank sampah Kenari Indah kota Probolinggo, dan membangun kolaborasi diantara para stakeholder yang ada khususnya dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Komunitas, *Civil society*, Bank sampah, Lingkungan hidup



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kesadaran tentang pentingnya usaha masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi sangat mendesak guna memastikan kelangsungan hidup manusia. Tanpa disadari, banyak kegiatan sehari-hari yang berpotensi merusak lingkungan (Mahulae, 2019).

Diperlukan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Terlebih lagi, isu lingkungan tidak lagi hanya lokal tetapi telah menjadi isu global dan menjadi kebutuhan seluruh masyarakat dunia (Kertati, 2018).

Pengembangan pengelolaan lingkungan hidup secara konkret harus ditingkatkan secara alami dan mandiri oleh unsur-unsur masyarakat itu sendiri, melalui kesadaran dan gerakan masyarakat sipil (*civil society*) yang menjadi penggerak dinamis bagi masyarakat untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sehingga selanjutnya dapat berkolaborasi dengan unsur-unsur masyarakat lain dan pemerintah dalam gerakan terpadu pelestarian lingkungan (Mochtar *et al.*, 2015). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para aktivis dan penggiat lingkungan hidup agar dapat bersama-sama dengan pemerintah bergerak dalam isu penyelamatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Salah satu isu lingkungan hidup yang penting namun tampak sepele adalah sampah (Wijayanti & Romas, 2020).

Pengelolaan sampah adalah masalah besar di kota Probolinggo. Secara keseluruhan, ada 40 ton sampah domestik yang harus dikelola setiap hari di Kota Probolinggo, dengan sampah padat per orang mencapai 2,5 kg. Hanya 70% dari jumlah tersebut yang dapat diangkut ke TPA. Tiga puluh persen lainnya mungkin dibakar atau ditimbun di tempat lain dan digunakan kembali. Klasifikasi jenis sampah, berdasarkan asalnya sampah yang diangkut ke TPA Kota Probolinggo berasal dari: permukiman, pasar dan perdagangan, pembersihan jalan, taman kota, sampah di sungai, terminal, rumah sakit (non medis), hotel, restoran, dan industri. Jumlah sampah terbesar berasal dari permukiman sebesar 65,18%, disusul dari pasar yaitu 19,81%, dan dari pembersihan jalan. Meskipun dari kawasan permukiman tinja tidak dimasukkan ke dalam sampah domestik, karena baik karakteristik dan pengolahannya berbeda (Rachmansyah *et al.*, 2021). Untuk mengatasi masalah penanganan sampah tersebut maka pemerintah kota Probolinggo membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan daerah kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 39 tahun 2015 tentang tim pelaksana pelayanan bank sampah kota Probolinggo.

Merujuk pada persoalan yang ada tersebut, maka tim pengabdian masyarakat FISIP UB memilih kota Probolinggo sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran kegiatan antara lain aktivis dan pegiat lingkungan hidup di kota Probolinggo yang tergabung dalam komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” Kota Probolinggo. Bank sampah “Kenari Indah” memiliki bidang kegiatan pemilahan sampah, pembelian dan penjualan sampah anorganik serta pengolahan sampah organik. Pengurus Bank sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo bergerak secara aktif partisipatif dan mandiri dalam melakukan berbagai aktivitas pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan beberapa komunitas permukiman sebanyak 18 komunitas sosial; serta sekolah-sekolah sebanyak 16 sekolah. Aktivitas utama dalam konteks ini adalah edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga meliputi organik dan anorganik. Upaya menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan lingkungan, juga dengan kelompok-kelompok dasa wisma dan gang-gang pemukiman penduduk untuk memberikan pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah rumah tangga.

Aktivitas bank sampah ini tidak sekedar melakukan aksi jual-beli sampah anorganik seperti kertas, botol, plastik dan sebagainya, tetapi lebih diutamakan pada edukasi lingkungan hidup dan mendapatkan sambutan baik di kalangan kelompok-kelompok RT, RW, gang-gang, dan sekolah-sekolah.

Dari skema kegiatan ini terbentuk komunitas di bawah komando bank sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo. Komunitas ini melakukan aktivitas pertemuan, edukasi keliling dan belum bersentuhan dengan pemerintah. Aktivitas komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo memenuhi kriteria informal *governance* ketika berhasil mengurus persoalan masyarakat dan merupakan sebuah komunitas untuk dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam hal kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo per tahun 2023, volume timbunan sampah organik dan anorganik mencapai lebih dari 76 ton per hari. Selain itu, terdapat 133 depo transfer sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi ini untuk melakukan reduksi produksi sampah pada tingkat primer yakni rumah tangga dan juga pabrikaan. Aktivitas komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo membutuhkan energi tambahan untuk dapat menjangkau komunitas lain di wilayah Kota Probolinggo secara lebih efisien dan terstruktur. Akan tetapi komunitas bank sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo belum memiliki sumberdaya untuk melakukan komunikasi politik dalam memperjuangkan pemedulian sampah secara terstruktur.

Menilik kondisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk dapat memberikan penguatan terhadap komunitas bank sampah “Kenari Indah” Kota Probolinggo dalam hal pengenalan pengetahuan tentang *Policy Community* (Muslihatin *et al.*, 2021), yang menempatkan komunitas bank sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo sebagai *civil society* yang memiliki peran dalam masukan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

2. Metode

Berdasarkan latar belakang permasalahan mitra tersebut, maka program pengetahuan tentang *Policy Community* (Komunitas Kebijakan), yang menempatkan komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo ini meliputi upaya mengenalkan pengetahuan mengenai *policy community* (komunitas kebijakan) dapat memberi manfaat bagi komunitas bank sampah “Kenari Indah” yang berlokasi di kelurahan Jrebeng Wetan, kecamatan Kedopok, kota Probolinggo, Jawa Timur ini untuk memperkuat kapasitas institusional internal, memperkuat kinerja jejaring sosial, dan memperkuat kemampuan negosiasi dan *lobbying* kepada pemerintah. Dari permasalahan mitra sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberi solusi dengan menggunakan basis konsep *policy community* melalui metode kegiatan, pertama adalah melalui penyampaian konsep *policy community* dalam model kegiatan workshop. Tahapan metode kedua, para peserta diajak langsung mempraktikkan konsep *policy community* serta upaya membangun kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah. Serta pada tahapan metode yang terakhir, peserta dievaluasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat terhadap sejauh mana pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir pelaksanaan.

3. Hasil dan Pembahasan

Persoalan sampah yang merupakan limbah padat sisa dari kegiatan manusia yang berdampak langsung pada kehidupan manusia umumnya menjadi permasalahan yang serius di daerah perkotaan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah menjadi tempat terakhir dari alur sampah yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya bahkan melebihi standar yang telah ditentukan. Permasalahan tersebut dibutuhkan langkah preventif oleh masyarakat secara luas melalui pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan guna mampu menekan angka timbulan sampah serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Pengelolaan sampah berbasis bank sampah dinilai dapat menjadi sebuah alternatif konsep pengelolaan sampah dengan mengadopsi sistem perbankan, konsep menabung sampah. Bank sampah difokuskan dalam pengelolaan sampah yang ditujukan kepada pemberdayaan masyarakat yang menciptakan rekayasa sosial. Sampah yang ditabung kemudian dikelola sedemikian rupa (daur ulang dan/atau digunakan ulang) oleh masyarakat sehingga memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut dicantumkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 yang kemudian diturunkan dan diterapkan menjadi perda atau peraturan pemerintah tiap daerah sehingga menjadi program pelestarian lingkungan di daerah kota maupun kabupaten, salah satunya kota Probolinggo.

Di kota Probolinggo, persoalan pengelolaan sampah merupakan hal yang serius. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, di Kota Probolinggo sampah padat yang dibuang setiap orang mencapai 2,5 kg/hari. Jumlah keseluruhan sampah domestik yang harus dikelola mencapai 40 ton/hari. Dari jumlah tersebut hanya 70% yang dapat diangkut ke TPA, sisanya 30% kemungkinan dibakar, ditimbun di berbagai tempat dan dimanfaatkan kembali. Klasifikasi jenis sampah, berdasarkan asalnya sampah yang diangkut ke TPA kota Probolinggo berasal dari: permukiman, pasar dan perdagangan, pembersihan jalan, taman kota, sampah di sungai, terminal, rumah sakit (non medis), hotel, restoran, dan industri. Jumlah sampah terbesar berasal dari permukiman sebesar 65,18%, disusul dari pasar yaitu 19,81%, dan dari pembersihan jalan. Meskipun dari kawasan permukiman tinja tidak dimasukkan ke dalam sampah domestik, karena baik karakteristik dan pengolahannya berbeda (*Rachmansyah et al., 2021*). Untuk mengatasi masalah sampah tersebut, maka pemerintah kota Probolinggo membuat sebuah kebijakan melalui peraturan daerah kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo nomor 39 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota sebagai bukti konkrit pemerintah kota Probolinggo dalam memperhatikan lingkungannya terutama pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Berangkat dari persoalan sampah di kota Probolinggo tersebut dan juga adanya komitmen pemerintah dalam mengembangkan alternative pengelolaan sampah berbasis bank sampah, maka tim pengabdian kepada masyarakat FISIP UB yang diketuai oleh Wawan Edi Kuswandoro beserta anggota dari Program Studi Ilmu Politik FISIP UB antara lain Novy Setia Yunas dan Amin Heri Susanto menyelenggarakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "Pengenalan *policy community* kepada komunitas bank sampah kenari indah kota Probolinggo". Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui 3 (tahapan) yakni pertama adalah melalui penyampaian konsep *policy community* (Komunitas Kebijakan) dalam forum lokakarya *workshop*. Tahapan metode kedua, para peserta diajak langsung mempraktikkan konsep *policy community* dalam pengelolaan bank sampah. Serta pada tahapan metode yang terakhir, peserta dievaluasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat terhadap sejauh mana pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir pelaksanaan. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat FISIP UB bermitra dengan Komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" yang berlokasi di kelurahan Jrebeng Wetan, kecamatan Kedopak, kota Probolinggo, Jawa Timur.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pertama, diawali dengan *workshop* yang didalamnya terdapat penjelasan tim pengabdian dengan membawa semangat “Kota Probolinggo bersih bebas sampah pada tahun 2025”. Untuk itu, segenap unsur masyarakat, pemerintah dan perusahaan yang hadir perlu mendiskusikan terkait tentang penanganan dan pengendalian sampah rencana *zero waste* atau bebas sampah tahun 2025. Untuk melakukan penanganan sampah, masyarakat membantu pemerintah bersama pihak-pihak yang peduli lingkungan, diantaranya PT. Pegadaian dan PT. Kutai Timber Indonesia (KTI). Upaya masyarakat yang memiliki peluang dan keterbatasan kebersamaan pemerintah untuk melakukan upaya pengelolaan sampah. Masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh komunitas bank sampah “Kenari Indah” dan para mitra dalam rangka menangani permasalahan sampah tidak mungkin melakukannya sendiri. Diperlukan penguatan unsur masyarakat dengan penguatan kelembagaan bank sampah dan siapa saja yang memiliki kepedulian tentang pengelolaan sampah. Model Bank Sampah lebih mendekati bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat untuk melakukan banyak hal dalam pengelolaan sampah memiliki sisi nilai ekonomis bagi masyarakat (Sakir & Setianingrum, 2021). Persoalan sampah menjadi urgen karena secepat atau secepatnya apapun prestasi dalam sebuah kota jika sampah tidak bisa dikendalikan maka akan mempengaruhi citra kota tersebut (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Setelah pemaparan tentang persoalan sampah di kota Probolinggo dan pengembangan bank sampah yang telah ada, maka tahapan kedua pada *workshop* tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat FISIP UB memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep *policy community* (komunitas kebijakan). Sesuai dengan konsepnya, Komunitas kebijakan lebih merupakan cara pandang alternatif yang mampu (minimal dalam pandangan para pendukungnya) merefleksikan dinamika kebijakan publik yang kian hari kian kompleks ketimbang sebagai pengganti dari perspektif-perspektif sebelumnya. Dengan similaritas pemahaman seperti ini, komunitas kebijakan memainkan beberapa peran vital dalam mengawal dinamika kebijakan publik (Mukhlis, 2018). Komunitas kebijakan memiliki beberapa karakter tipikal berikut: Pertama, memiliki keanggotaan yang terbatas dengan latar belakang kepentingan tertentu yang terkadang secara sadar atau tidak sadar dapat mengeksklusi kelompok lain; kedua, memiliki nilai bersama; ketiga, berinteraksi secara periodik; keempat, adanya pertukaran sumber daya yang dikelola oleh para pemimpinnya; dan kelima, adanya keseimbangan kekuasaan relatif di antara para anggotanya (Mukhlis, 2018).

Konsep-konsep dasar mengenai *policy community* (komunitas kebijakan) tersebut yang harus diberikan kepada para peserta di tahap awal pelaksanaan *workshop*, mengingat keberadaan konsep *policy community* (komunitas kebijakan) ini penting terhadap upaya memberikan pengaruh dan kekuatan kelompok-kelompok ekstra negara pada sebuah kebijakan pemerintah. *Civil society* termasuk komunitas-komunitas sosial masuk dalam kategori ini (Regilme, 2018). Komunitas Kebijakan tampil dengan spiritualitas baru di mana semua aktor yang memiliki taruhan atas suatu kebijakan turut dilibatkan dalam wujud partisipasi (Hendriks & Lees-Marshmen, 2019). Negara, sebaliknya, akan berperan sebagai fasilitator yang adil sebagaimana diidealkan para pemikir pluralis (Wiarda, 2014). Dengan demikian, tugas utamanya adalah memfasilitasi sebuah forum yang mampu mempertemukan aktor-aktor tersebut untuk secara bersama merumuskan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan (Barone *et al.*, 2013). Dalam konteks isu sosial semisal lingkungan hidup khususnya persampahan yang membutuhkan peran sosial dan partisipasi masyarakat dan pemerintah, dibutuhkan jaringan kerja sosial yang melibatkan masyarakat dan pemerintah (Edi Kuswandro, 2023).

Dalam isu lingkungan hidup khususnya permasalahan sampah pada daerah kerja mitra, mitra terposisikan belum memiliki referensi yang memadai untuk melakukan jejaring kerjasama institusional. Karena itu program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pengetahuan di bidang *policy community* bagi komunitas bank sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan menekankan pada *policy community* bagi komunitas bank sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo ini tentu juga relevan dengan konteks perkembangan saat ini bahwa harus ada kolaborasi yang dilakukan oleh banyak pihak. Pada kegiatan *workshop* yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat memberikan wawasan serta dorongan untuk dapat membangun kolaborasi dengan berbagai aktor dalam mengembangkan komunitas bank sampah “Kenari Indah” di kota Probolinggo tersebut.

Pemahaman yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat melalui *workshop* lebih ditekankan pada konsep *policy community* (komunitas kebijakan) yang erat kaitannya dengan konsep *collaborative governance* (Donahue & Zeckhauser, 2012). Jika kita merujuk pada konsep yang berkembang dalam kaidah pengetahuan ilmu politik, secara umum keduanya memiliki karakteristik yang sama yakni adanya keterlibatan para pemangku kepentingan, adanya nilai (tujuan) bersama yang diperjuangkan sebagai sebuah konsensus, serta keseimbangan peran dan kekuasaan dari para kolaborator (Yunas & Nailufar, 2019). Meski demikian, konsep komunitas komunitas lebih berdimensi sebagai wadah bersama (kolektif). *Collaborative governance* yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terlembaga dalam forum khusus pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan keberlangsungan komunitas kebijakan dalam jangka panjang (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, keberadaan komunitas kebijakan khususnya dalam komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” di kota Probolinggo harus didorong oleh para pihak yang bersepakat untuk berkolaborasi (Gambar 1).



Gambar 1. Kegiatan *Workshop* Pengenalan *Policy Community* pada Komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” Kota Probolinggo



Gambar 2. Praktik Kolaborasi Kegiatan *Workshop* Pengenalan *Policy Community* Pada Komunitas Bank Sampah “Kenari Indah”

Untuk mendorong kolaborasi yang bersifat jangka panjang dan dapat bertahan dengan lama, maka sesuai dengan tahapan yang ada di dalam kegiatan workshop tersebut, peserta diajak untuk mempraktikkan bagaimana berkolaborasi yang baik diantara stakeholder dalam mengembangkan bank sampah. Para peserta diberikan masalah yang akan diselesaikan dengan cara pandang *policy community* dan kolaborasi. Praktik yang diberikan berbasis kasus ini terbukti efektif untuk dapat mendorong para peserta mengimplementasikan dengan baik apa yang telah diperoleh pada komunitasnya. Sehingga pada tahapan akhir, evaluasi, para peserta telah dapat memahami secara komprehensif tentang bagaimana *policy community* dapat diimplementasikan pada pengelolaan atau pengembangan bank sampah yang ada pada komunitas bank sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo tersebut. Serta, yang paling penting juga para peserta mampu memahami secara baik bagaimana membangun kolaborasi diantara para *stakeholder* yang ada khususnya dalam pengelolaan sampah. Sehingga, setelah ini mereka mampu berkomunikasi serta membangun jejaring dengan para aktor seperti pemerintah, sektor swasta, NGO, perguruan tinggi dan aktor-aktor lainnya dalam rangka mengembangkan Komunitas Bank Sampah mereka yang telah berkembang sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentu telah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh tim yakni meningkatkan kompetensi serta kemampuan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, mendorong adanya pemahaman yang komprehensif terhadap *policy community* dalam pengelolaan bank sampah serta yang terpenting adalah meningkatkan partisipasi serta mendorong upaya kolaboratif dengan stakeholder terkait dalam pengembangan pada komunitas bank sampah. Sehingga harapannya, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi *role model* penanganan masalah sampah dan mendorong keberlanjutan ekologis di masyarakat berbasis pengembangan bank sampah di komunitas mapun daerah lainnya.

4. Kesimpulan

Penanganan sampah yakni pengendalian dan pengolahan sampah musti diselenggarakan secara simultan dengan melibatkan semua elemen pemerintahan, kemasyarakatan dan dunia industri/ dunia usaha. Diperlukan edukasi publik secara menyeluruh tentang pengendalian dan pengolahan sampah dengan mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber primer yakni rumah tangga, industri, dan lembaga-lembaga, karena semua unit kegiatan pasti memproduksi sampah.

Model bank sampah sebagai *agency* pengelolaan sampah pada level primer adalah model yang lebih sesuai dan dekat dengan kebiasaan masyarakat, yang mana, sebagai model, dapat mengambil bentuk pada infrastruktur sosial yang ada misalnya dasa wisma, kelompok PKK, posyandu dan sebagainya. Fungsi bank sampah baik pada bentuk bank sampah maupun yang menempel pada organ infrastruktur sosial yang ada misalnya dasa wisma, kelompok PKK, posyandu tersebut melakukan pengolahan dan pengurangan sampah pada sumber primer sehingga mengurangi beban TPS dan TPA secara maksimal. Komunitas Kebijakan pada lingkup kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup merupakan model orkestrasi peran-peran dan fungsi-fungsi *stakeholders* yang tergabung dalam sebuah komunitas terinstitusi untuk melakukan gerakan terencana, terstruktur dan massif pada pengelolaan sampah sekaligus memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup khususnya penanganan dan pengendalian sampah. Penanganan dan pengendalian sampah secara holistik multistakeholders dalam kerangka kerja Komunitas Kebijakan secara teknis dapat mengambil bentuk pentahelix dalam fungsi dan peran ganda: penanganan objek material (sampah) dan masukan formulasi dan evaluasi kebijakan oleh komunitas.

Acknowledgement

Artikel ini didedikasikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kepada ketua tim pengabdian masyarakat almarhum Dr. Wawan Edi Kuswandro yang telah berpulang ke *rahmatullah* pada tanggal 09 Oktober 2024 lalu. Artikel ini merupakan amanah almarhum Dr. Wawan Edi Kuswandro setelah keluar dari rumah sakit pada bulan Agustus-September 2024 yang disampaikan pada anggota tim. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah mendukung terselenggaranya program pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Brawijaya tahun 2024 ini, khususnya kepada Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) FISIP Universitas Brawijaya atas skema hibah Pengabdian kepada Masyarakat Internal FISIP UB tahun 2023. Serta apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” kota Probolinggo.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Barone, E., Ranamagar, N., & Solomon, J. F. (2013). A Habermasian model of stakeholder (non)engagement and corporate (ir)responsibility reporting. *Accounting Forum*, 37(3), 163–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.12.001>
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2012). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press.
- Edi Kuswandro, W. (2023). From Reluctance to Acceptation: Participation of Poor-People in Policy Implementation Using Discursive Institutionalism. *Jurnal Transformatif*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2023.009.01.1>
- Hendriks, C. M., & Lees-Marshmen, J. (2019). Political Leaders and Public Engagement: The Hidden World of Informal Elite–Citizen Interaction. *Political Studies*, 67(3), 597–617. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0032321718791370>

- Kertati, I. (2018). Merebut Pemilih Pemula. *Mimbar Administrasi*, 15(1), 9-20. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/734>
- Mahulae, P. J. M. (2019). Deskripsi permasalahan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba Sumatera Utara. *Inovasi*, 16(1), 11-20.
- Mochtar, H., Wisadirana, D., & Kuswandro, W. (2015). the Policy Environment in Urban Area: Public Participation in Waste Management in Probolinggo. *International Journal of Technical Research and Applications*, 33(33), 12-16.
- Mukhlis, M. (2018). Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung). *Agresi*, 6(2), 139-148.
- Muslihatin, W., Purwani, K. I., Ermavitalini, D., Prasetyo, E. N., Nurhatika, S., Nurhidayati, T., Jadid, N., Febrianti, A., Yunas, N. S., Raikhani, A., & Sari, L. R. (2021). Community empowerment of Sumberpelas, Plabuan Village-Jombang to create independent and sustainable Moringa oleifera village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 649(1), 1-7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/649/1/012034>
- Rachmansyah, A., Meidiana, C., Meisy, I., Rahmawati, P., Sipil, J. T., Brawijaya, U., Perencanaan, J., & Brawijaya, U. (2021). Kebutuhan Area Penimbunan Di Tempat Pengolahan Provinsi Jawa Timur Alumni Program Magister , *Jurusan Teknik Sipil , Universitas Brawijaya , Malang. Rekaya Sipil*, 15(2), 127-134.
- Regilme, S. S. F. (2018). Habermasian thinking on civil society and the public sphere in the age of globalization. *Perspectives on Political Science*, 47(4), 271-277. <https://doi.org/10.1080/10457097.2016.1175805>
- Wiarda, H. J. (2014). *Political Culture, Political Science, and Identity Politics An Uneasy Alliance*. Routledge Taylor and Francis Group.
- Wijayanti, N., & Romas, A. N. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Di Sumberagung Jetis Bantul Diy. *Jurnal Kesehatan Dan Pengelolaan Lingkungan*, 1(1), 28-38. <https://doi.org/10.12928/jkpl.v1i1.1637>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 162-173.